



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SINGKERRU**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **634920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.045.000.000**

1. Tanah Seluas 551 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 1209 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1144 m2/405 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **565.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, WULING ALMAZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.295.234
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.646.295.234
III. HUTANG	Rp.	85.646.912
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.560.648.322

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.